

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel Pada Perseroan Terbuka Yang Menerapkan *Multiple Voting Shares* Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diterbitkannya POJK 22/2021 ini memiliki peran untuk mendorong pendalaman pasar modal serta untuk mendukung perusahaan *start-up* yang membutuhkan modal lebih sehingga diperlukannya penerapan klasifikasi saham MVS. Sebelum adanya penerapan klasifikasi saham MVS, seringkali perusahaan *start-up* kehilangan kendali akan perusahaannya dikarenakan kebutuhan akan modal yang belum tercukupi mengakibatkan perusahaan harus menjual banyak sahamnya kepada publik sehingga pendiri kehilangan kendali atas perusahaan yang telah didirikan dan menyebabkan perusahaan berjalan tidak sesuai dengan visi dan misi awal. Penerapan klasifikasi saham MVS di luar negeri sudah merupakan praktik yang lazim diberlakukan untuk perusahaan berbasis teknologi. Sehingga, adanya penerapan klasifikasi saham MVS di Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi visi dan misi perusahaan agar tetap sesuai dengan tujuan pendiri serta pengendalian terhadap perusahaan tidak berpindah kepada pemegang saham publik. Adanya penerapan klasifikasi saham MVS ini pun sejatinya tidak mengakibatkan penerapan prinsip *one share one vote* pada PT Tbk menjadi dikesampingkan atau tidak diterapkan. Sehingga, penerapan klasifikasi saham MVS pada POJK 22/2021 sejatinya tetap sejalan dengan penerapan klasifikasi saham pada UU PT. Hal ini dikarenakan penerapan klasifikasi saham MVS ini sama saja seperti pemberian hak istimewa kepada pemegang saham dengan hak suara

multipel agar tetap memegang kendali pada perusahaan sehingga perusahaan tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi awal, yang mana pemberian hak istimewa kepada pemegang saham pun nyatanya telah diatur dan diperbolehkan oleh klasifikasi saham pada UU PT.

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil yaitu dengan memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada UU PT, yang mana pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya apabila tidak menyetujui keputusan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.

5.2. Saran

Pemerintah diharapkan menambahkan beberapa pengaturan pada POJK 22/2021 terutama dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan pada POJK 22/2021 tersebut tidak terdapat bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil jika terjadi perbedaan suara dengan pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2022.

Dr. Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal

Dedek Wira Priatna, Hamdani, dan Tri Widya Kurniasari, *Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Oleh Emiten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV, No. 2, 2021.

Hendy Martin Butar-Butar, Budiman N.D.P Sinaga, dan Tulus Siambaton, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka*, Volume 07, Jurnal hukum, 137, 147, 2017.

Hilda Hilimiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, No. 2, 2014.

Ida Keriahenta Silalahi dan Nur Sayidah, *Konsep dan Manfaat Pengaturan Saham tanpa Nilai Nominal dalam Pasar Modal Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, 190, 192, (2014).

Marcelline Allegra, Tarsisius Murwadji, dan Nun Harrieti, *Akibat Hukum Pemberlakuan Multi Voting Shares Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia*, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Volume 1, No. 2, 2023.

Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi*, *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32, No. 3, 2017.

Patricia Leilani Natalia, *Perlindungan Hukum Minority Shareholder pada Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Prinsip Keadilan*, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 11, No. 3, 2023.

Rasji dan Dwi Indriyanie, *Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Bagi Pemegang Saham Emiten Dalam Perspektif Keadilan*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, No. 2, 2023.

Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra, Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan, Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, 242, 246 (2019).

Riri Lastiar Situmorang dan Rasji, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbuka*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 12, No. 1, 2023.

Suwinto Johan, Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jurnal Mercatoria, 38, 39, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1995, Pasar Modal, L.N.R.I., Tahun 1995 No. 106.

Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 106.

Undang-Undang R.I., No. 6 Tahun 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I., No. 02 Tahun 2022, Cipta Kerja, L.N.R.I., Tahun 2023 No. 238.

Peraturan Bank Indonesia R.I., Nomor 8/13/PBI/2006, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, L.N.R.I., Tahun 2006 No. 70.

Peraturan Bank Indonesia R.I., Nomor 13/2/PBI/2011, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, L.N.R.I., Tahun 2011 No. 6.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 21 Tahun 2015, Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, L.N.R.I., Tahun 2015 No. 276.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 32 Tahun 2015, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, L.N.R.I., Tahun 2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 73 Tahun 2016, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, L.N.R.I., Tahun 2016 No. 306.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., Nomor 59/POJK.03/2017, Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, L.N.R.I., Tahun 2017 No. 278.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., Nomor 1/POJK.03/2019, Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, L.N.R.I., Tahun 2019 No. 20.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 20 Tahun 2021, Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, L.N.R.I., Tahun 2021 No. 261.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 03 Tahun 2021, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, L.N.R.I., Tahun 2021 No. 71.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 15 Tahun 2022, Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, L.N.R.I., Tahun 2020 No. 103.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I., Nomor Per-2/MBU/03/2023, Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, L.N.R.I., Tahun 2023 No. 262.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I., No. 17 Tahun 2023, Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, L.N.R.I., Tahun 2023 No. 30.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan R.I., Nomor 25/SEOJK.03/2023, Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, L.N.R.I., Tahun 2023.

Artikel

Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

Anita Anand, Offloading the Burden of Being Public: An Analysis of Multiple Share Structures, <https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/88098/1/Anand%20Offloading%20the%20Burden.pdf>

G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, <https://www.oecd.org/publications/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023-ed750b30-en.htm>